

TESIS

**TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**



OLEH :

ROMLATUST NAINI, S.H

032024253011

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

2022

TESIS

**TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

Romlatust Naini, S.H

NIM. 032024253011

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

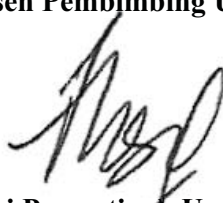
2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui

Tanggal 13 Juni 2022

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001

Dosen Pembimbing Kedua,



Dr. Sukardi, S.H., M.H.
NIP. 196106271989031002

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 27 Juni 2022**

TIM PENGUJI TESIS :

**Ketua : Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H
NIP. 198003202005012002**

**Anggota : 1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001
2. Dr. Sukardi, S.H., M.H.
NIP. 196106271989031002
3. Erni Agustin, SH., LL.M.
NIP. 198308102006042001
4. Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M.
NIP. 198512082008122001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- Nama : Romlatust Naini, S.H
- N I M : 032024253011
- Alamat/No. Tlp. : Demangan, Bangkalan.

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



MOTTO

“Lihatlah dirimu dan percayalah kesempatan selalu ada padamu, menyerah dan mengalah bukanlah jalan keluar dari setiap permasalahan. Terkadang kita harus tengil, keras kepala dengan mimpi yang sedang kita usahakan.”

ABSTRAK

Kedudukan anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan, pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pokok permasalahan dalam hal ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatat, yang kemudian disebut dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti terkait dengan kriteria dan kedudukan anak luar kawin dalam Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, serta urgensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Pembaharuan Hukum (*Legal Reform*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya definisi dan kriteria terkait dengan frasa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan”, dalam hal ini anak sebagaimana dimaksud apakah dapat diartikan sebagai anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, atau malah dapat diartikan sebagai anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah dari orang tuanya. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan multitafsir dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Urgensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan ini membawa implikasi yuridis diantaranya **Pertama** penyesuaian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan anak yakni UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, dan UU Perlindungan Anak. **Kedua**, Pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan dengan adanya peraturan pemerintah untuk mengatur dan menjamin secara pasti hak-hak anak luar kawin. **Ketiga** Pembentukan Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan kepada kedudukan dan hak-hak anak luar kawin.

Kata Kunci : Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Anak Luar Kawin, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

*The position of children out of wedlock in the provisions of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law underwent a change, after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The main problem in this case is that children born from marriages are not recorded, which are then called children born outside of legal marriages. This becomes interesting to study in relation to the criteria and position of children out of wedlock in the provisions of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, as well as the urgency of the establishment of Legislation Regulations after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. There are several approaches used in answering legal issues in this research, Statute Approach, the Conceptual Approach and the Legal Reform. The results of this study indicate that there is a need for definitions and criteria related to the phrase "children born outside of marriage", in this case the child referred to can be interpreted as children born from marriages that are not recorded, or can even be interpreted as children born without a legal marriage from their parents. This is intended so as not to cause multiple interpretations and ensure the fulfillment of children's rights. The urgency of the formation of legislation after the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010, this decision has juridical implications including : **First**, adjustments to laws relating to children, namely the Marriage Law, Citizenship Law, and Child Protection Law. **Second**, the implementation of the provisions of Article 43 paragraph (2) of the Marriage Law with the existence of government regulations to regulate and guarantee the rights of children out of wedlock. **Third**, the establishment of a Presidential Regulation as an implementing rule for the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which provides protection to the position and rights of children out of wedlock.*

Keywords: *Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Children Out of Wedlock, Formation of Legislation*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT karena hanya dengan Ridho-Nya lah Tesis dengan judul “Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan rasa hormat kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA** selaku Rektor Universitas Airlangga atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga Surabaya.
2. **Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.H., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum dan segenap jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Airlangga Surabaya.
3. **Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.** dan **Bapak Oemar Moechtar, S.H., M.Kn.** Selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, terima kasih telah memberikan bantuan administrasi dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. **Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.** dan **Dr. Sukardi S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan tidak bosan-bosannya meneliti, memberikan masukan, arahan dan sarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh tim penguji Ujian Tesis, **Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Dr. Sukardi S.H., M.H., Erni Agustin, S.H., LL.M., Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M.**, Terima kasih atas masukan dan saran serta sumbangsih pemikirannya, sehingga saya dapat melanjutkan proses penulisan tesis ini.
6. Para Dosen pengajar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan pembekalan ilmu hukum khususnya

dibidang kenotariatan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masa depan penulis.

7. Para staff serta karyawan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu untuk memberikan sarana dan prasarana selama penulis berproses di Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Kedua orang tua yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
9. Teman-teman Calon-calon Orang Sukses yaitu Pradita Putri Rachmawati, Fadhilah Atika Suri, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman Angkatan 2021 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya teman-teman Kelas B yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semangat teman-teman kuliah dan pengerjaan tesisnya.
11. Keluarga di kampus yaitu HIMANAIR terimakasih atas pengalaman yang sangat luar biasa.

Harapan penulis, semoga Tesis ini dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 16 Juni 2022

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW), Staatsblad 1847 Nomor 23;

Undang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5);

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

DAFTAR ISI

TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	14
1.6.2 Pendekatan (Approach)	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum (Legal Sources).....	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19

1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	19
1.7 Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM KETENTUAN	
PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.....	22
2.1. Kedudukan dan Hak Anak Dalam Perkawinan	22
2.1.1 Menurut Undang-undang Perkawinan	22
2.1.2 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU - VIII/2010	31
2.2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin	38
2.2.1 Keadilan Sebagai Tujuan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin	38
2.2.2 Hak Anak Luar Kawin Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia	40
BAB III.....	45
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-	
VIII/2010	45
3.1 Pembaharuan Hukum Terkait Status Anak dan Perlindungan Hukumnya.....	45
3.1.1 Undang-undang Perkawinan.....	45
3.1.2 Undang-undang Kewarganegaraan.....	49
3.1.3 Undang-undang Perlindungan Anak.....	53
3.2 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	58
3.2.1 Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	58

3.2.2 Jenis Peraturan Perundang-undangan Sebagai Aturan Pelaksana atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	64
BAB IV	76
PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	77
DAFTAR BACAAN	79